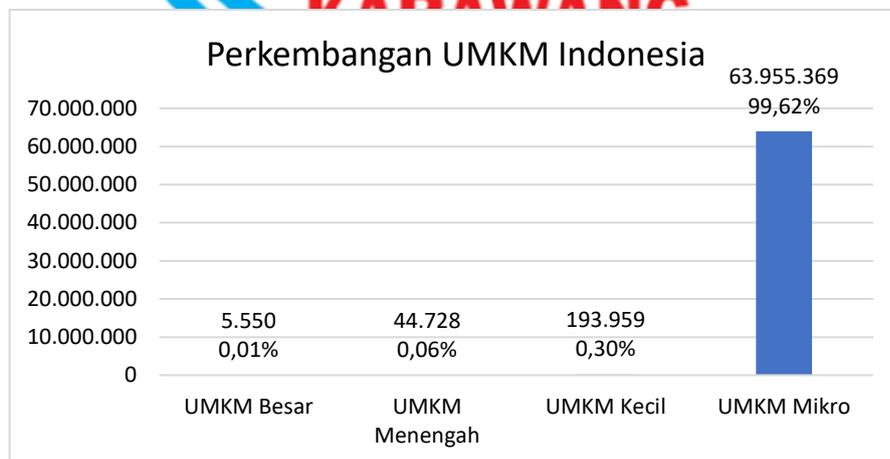


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, salah satu langkah strategis adalah menumbuhkembangkan usaha kecil yang memiliki karakteristik antara lain, teknologi sederhana serta mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2021).



Sumber: Kemenkopukm, 2022

Gambar 1.1
Perkembangan UMKM Indonesia

Para pebisnis UMKM menghadapi berbagai kendala terkait pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan usahanya (Siagian & Indra, 2019). Minimnya pengetahuan pencatatan dan laporan keuangan menjadi sumber permasalahan mengapa pelaku UMKM mengabaikan laporan keuangan usahanya. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pencatatan laporan keuangan dikalangan UMKM menimbulkan permasalahan sehubungan dengan perilaku manajemen keuangan. Di sisi lain, laporan keuangan sangat berguna dalam pengambilan keputusan (Oktaviani, 2020).



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2022

Gambar 2.1

Perkembangan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan UMKM terus mengalami peningkatan secara signifikan, adapun jumlah UMKM di Kabupaten Karawang pada tahun 2022 mencapai 95.102 UMKM. Pada tahun 2018 jumlah UMKM aktif sebanyak 43.825 UMKM, pada tahun 2019 jumlah UMKM aktif mengalami peningkatan dengan jumlah sebanyak 44.035 UMKM, selanjutnya pada tahun 2020 jumlah UMKM terus bertambah yaitu sebanyak 8.175 UMKM, pada tahun 2021 pertumbuhan UMKM meningkat secara drastis sebesar 28,68 % lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 15,81% UMKM, pada tahun 2022 jumlah UMKM bertambah sebanyak 590 UMKM, sehingga pada tahun

2022 secara keseluruhan total UMKM aktif mencapai 28,86% UMKM. Ada beberapa faktor yang mendorong meningkatnya perkembangan UMKM, yaitu: pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi, kemudahan peminjaman modal usaha, dan menurunkan tarif PPh final (Soetjipto, 2020).

Tabel 1.1
Hasil Pra Riset

NO.	PERNYATAAN	Jawaban	
		Setuju	Tidak Setuju
Penerapan SAK EMKM			
1	Saya membuat laporan posisi keuangan dan diterbitkan di tiap akhir periode.	17	3
2	Saya merinci akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak dalam laporan keuangan.	12	8
3	Saya membuat catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan.	11	9
Kompetensi Akuntansi			
4	UMKM dalam menganalisis transaksi mendasar pada persamaan akuntansi.	13	2
5	Saya merasa sulit membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku	14	6
6	Saya memahami proses penyusunan laporan keuangan.	14	6
Sistem Informasi Akuntansi			
7	Tempat usaha memiliki alat/perangkat keras yang cukup untuk digunakan bekerja.	11	9
8	Tempat usaha memiliki sistem aplikasi dalam mengolah laporan keuangan.	15	5
9	Karyawan mahir menjalankan/mengoperasikan aplikasi yang dimiliki.	10	5
Kualitas Laporan Keuangan			

NO.	PERNYATAAN	Jawaban	
		Setuju	Tidak Setuju
10	Peran laporan keuangan sebagai bahan perencanaan.	17	3
11	Penyajian informasi dalam laporan keuangan UMKM didasarkan pada standar yang berlaku.	9	11
12	Penyajian informasi dalam laporan keuangan UMKM harus menggunakan format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	9	11

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan pada UMKM Kabupaten Karawang sebanyak 20 UMKM, menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM belum berjalan, hal ini dilihat dari beberapa pelaku UMKM yang memberikan jawaban tidak setuju. Masih adanya pelaku UMKM hanya membuat laporan laba rugi saja, dikarenakan adanya ketidakpahaman dan menganggap bahwa laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan bukanlah suatu hal yang krusial. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam memahami jenis laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Selain penerapan SAK EMKM, salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi laporan keuangan yaitu kompetensi akuntansi. Hasil pra riset menunjukkan bahwa masih adanya pelaku UMKM yang belum memahami penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang. Adanya sistem informasi akuntansi untuk mempermudah pengelolaan keuangan UMKM. Berdasarkan hasil pra riset menunjukkan bahwa UMKM sudah mengalami perkembangan, namun masih adanya pelaku UMKM yang belum melakukan penyusunan laporan keuangan secara komputerisasi, hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM beranggapan jika melakukan pencatatan

laporan keuangan menggunakan sistem informasi akuntansi (SIA) akan menambah biaya operasional yang dikeluarkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Melihat perkembangan UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tidak dibarengi dengan kesadaran para pemilik kegiatan usaha kecil-kecilan tersebut untuk mencatat laporan keuangan. Pelaku UMKM belum memahami pentingnya pencatatan laporan keuangan untuk kegiatan usahanya, dimana di era modern ini banyak kegiatan usaha ekspor-impor yang dilakukan di Indonesia. Pencatatan laporan keuangan pada sektor UMKM masih dilakukan secara sederhana. Disinilah pentingnya penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM), kompetensi akuntansi dan sistem informasi akuntansi bagi para pelaku UMKM, karena dengan penerapan yang tepat, para pelaku UMKM dapat memberikan informasi kualitas laporan keuangan yang lebih lengkap dan terstruktur terkait bisnis dan posisi keuangannya.

Keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Karawang menjadi peluang yang besar bagi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki potensi pendidikan yang tinggi atau bagi masyarakat kecil dan menengah memperoleh pekerjaan. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang dapat memberikan kontribusi untuk sumber pendapatan asli daerah, sumbangan peningkatan sumber PAD dari kegiatan koperasi dan usaha mikro kecil menengah dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan di sektor-sektor publik lainnya. Selanjutnya, perkembangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Karawang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Perkembangan kegiatan ekonomi di bidang UMKM tersebut dapat menjadi peluang besar kegiatan usaha masyarakat Karawang dalam meningkatkan taraf hidupnya. Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) mengatakan salah satu indikator untuk

mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang harus dipenuhi dan di capai oleh Pemerintah Daerah diantaranya umur yang panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Program pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu upaya Pemerintah Karawang meningkatkan IPM masyarakat.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dapat didukung dengan beberapa faktor, salah satunya harus berdasar pada standar yang berlaku yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah atau lebih dikenal dengan sebutan SAK EMKM. SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Menindak lanjuti permasalahan pada pelaku UMKM, pencatatan transaksi pada entitas UMKM yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah berupa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM), yang menyederhanakan standar sebelumnya yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang secara efektif berlaku mulai 1 Januari 2018 (Sudirwan, 2019).

Berdasarkan informan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, UMKM yang berada di Kabupaten Karawang cukup bervariasi mulai dari sektor perdagangan, jasa dan industri dengan jumlah yang signifikan. UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mencapai jumlah 95.102. Pelaku UMKM di Kabupaten Karawang yang mengetahui SAK EMKM masih tergolong sedikit, hal ini di sebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pelaporan keuangan serta kurangnya sosialisasi terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Menurut (Natsir *et al.*, 2019) mengungkapkan SAK

EMKM hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, berpikir bahwa pelaporan tidak penting sehingga pengelolaan laporan keuangan dibuat apa adanya serta beranggapan tanpa adanya SAK EMKM aktivitas bisnis masih tetap berjalan. Penelitian yang dilakukan (Cahyani *et al.*, 2020); (Sa'adah, 2022); (Erawati & Chaerunisa 2021).; menyatakan bahwa SAK EMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Widiastoeti & Sari, 2020) menyatakan bahwa SAK EMKM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang diketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak di dukung dengan kompetensi SDM yang dimiliki akuntansi sendiri maka penyusunan laporan keuangan tidak dapat dilakukan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Nyoman *et al.*, 2014 dalam Adriani, 2018). Dengan adanya kompetensi akuntansi dapat diketahui apakah UMKM telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dengan demikian kreditor maupun investor dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunaannya.

Dalam penelitian ini kompetensi akuntansi yang dimaksud adalah mengetahui tentang ilmu akuntansi baik dasar ataupun lanjutan dan memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pada transaksi atau peristiwa yang dicatat dalam siklus akuntansi, serta dapat menyiapkan, menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kompetensi akuntansi dapat diukur berdasarkan tingkat pemahaman yang tinggi. Kompetensi dari masing-masing SDM akuntansi harus memiliki skill, dan pengetahuan yang luas yang di dukung pendidikan yang tinggi serta pelatihan yang memadai dapat mempengaruhi kompetensi yang dimiliki oleh setiap SDM akuntansi. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka semakin tinggi juga hasil kualitas suatu laporan keuangan (Sudiarti &

Juliarsa, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Mawarni & Nuraini, 2021) menyatakan bahwa kompetensi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada UMKM sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan usaha dan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan yang baik membutuhkan penggunaan sistem informasi akuntansi yang efektif. Sistem informasi yang digunakan oleh sebagian besar UMKM tergolong rendah, mengingat semakin besarnya persaingan antar UMKM dimana metode tradisional dianggap kurang mampu menyediakan informasi yang akurat dan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan (Astriani *et al.*, 2022).

Pebisnis UMKM di era digital seperti sekarang ini mengalami kendala pada banyaknya pebisnis yang belum memahami tentang akuntansi (Dawam, 2018). Pembukuan yang dilakukan oleh sebagian besar UMKM masih menggunakan pencatatan manual atau teknologi aplikasi sederhana yang kurang efektif dan efisien pada bisnisnya yang berpotensi semakin besar (Ayem *et al.*, 2020). Bagi pelaku UMKM, sistem informasi akuntansi memudahkan pelaku dalam mengelola usahanya. Selain itu, pelaku UMKM juga lebih mudah dalam menentukan suatu keputusan dengan mempertimbangkan informasi-informasi akuntansi yang telah ada. Penelitian yang dilakukan oleh (Elfrida & Pramudiati, 2022); (Animah *et al.*, 2020) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Setianda *et al.*, 2019) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini terinspirasi dari (Mawarni & Nuraini, 2021) yang meneliti pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan kompetensi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM Di Kabupaten Bogor, sedangkan pada penelitian ini meneliti pengaruh penerapan SAK EMKM, kompetensi akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Dengan menambahkan keterbaharuan variabel independen penerapan SAK EMKM dan sistem informasi akuntansi yang diyakini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat keberagaman dan ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti kembali dampak atau pengaruh penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, Kompetensi Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM dengan judul **“Pengaruh Penerapan SAK EMKM, Kompetensi Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM
2. Masih adanya pelaku UMKM yang tidak membuat laporan posisi keuangan dan CALK pada laporan keuangannya.
3. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang
4. Masih adanya pelaku UMKM yang belum melakukan penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem.
5. Adanya perbedaan dan ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian terdahulu.

1.3 Batasan Masalah

1. Batasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan SAK EMKM, kompetensi akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.
2. Batasan populasi penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada sektor UMKM yang terdapat di Kabupaten Karawang.
3. UMKM skala kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan SAK EMKM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kabupaten Karawang?

2. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana Pengaruh Penerapan SAK EMKM, Kompetensi Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kabupaten Karawang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan SAK EMKM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kabupaten Karawang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kabupaten Karawang.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kabupaten Karawang.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan SAK EMKM, Kompetensi Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kabupaten Karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dan referensi bagi penulis berikutnya. Terutama untuk Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), Kompetensi Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi sektor UMKM yang terdaftar di Kabupaten Karawang.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi keuangan yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, Kompetensi

Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM.

b. Bagi pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja UMKM, terutama yang berkaitan dengan Kualitas Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

c. Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk bahan pembelajaran dalam pendidikan terkait mengenai pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

